

REVIEW RENCANA STRATEGIS 2012-2017



**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN D. I. YOGYAKARTA**

**DINAS PERTANIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Jl. Gondosuli No. 6 ☎ (0274) 588938; 563937, Fax 563937 Email: distan@jogjaprovo.go.id

TAHUN 2015



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PERTANIAN

Jl. Gondosuli No. 6 ☎ (0274) 588938; 563937 Fax 563937 Email : distan@pemda-diy.go.id
YOGYAKARTA 55165

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor :

TENTANG
REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012-2017
DINAS PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa agar pembangunan pertanian dapat dilaksanakan setiap tahun secara terpadu dan tepat sasaran, dibutuhkan dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2012-2017 ;
- b. bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Review RPJM Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dilakukan perubahan target indikator kinerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian DIY tentang Review Rencana Strategis Tahun 2012 - 2017 Dinas Pertanian DIY.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah DIY;
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
16. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian;
17. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur RPJMD 2012-2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Review Rencana Strategis Tahun 2012-2017 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Review Rencana Strategis Tahun 2012-2017 disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Pembangunan Pertanian dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain untuk pelaksanaan program-program pembangunan pertanian dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Perubahan target indikator kinerja dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi yaitu adanya perubahan data dasar dan cara perhitungan yang disesuaikan dengan BPS.
- KEEMPAT : Review Rencana Strategis Tahun 2012-2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan SKPD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 27 Februari 2015

KEPALA DINAS PERTANIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. SASONGKO, M. Si.
NIP 19591216 198603 1 007

KATA PENGANTAR

Dengan bimbingan Allah Yang Maha Kuasa, Review Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta telah dapat disusun. Penyusunan Review Renstra merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 yang direview pada tahun 2014.

Review Renstra ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi penyusunan usulan program/kegiatan tahunan selama kurun waktu 2016-2017 guna mendukung tujuan dan sasaran program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah DIY dan guna memberikan hasil signifikan bagi kesejahteraan masyarakat pertanian. Review Renstra diutamakan pada perubahan target indikator kinerja pada indikator jumlah produksi tanaman pangan, jumlah populasi ternak dan nilai NTP.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan buku Review Renstra ini masih terdapat sejumlah kekurangan. Untuk itu, saran, kritik, dan masukan lain yang membangun sangat diharapkan untuk keperluan revisi buku ini dan demi penyempurnaan buku serupa di waktu mendatang.

Yogyakarta, 27 Februari 2015

KEPALA DINAS PERTANIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. SASONGKO, M. Si.
NIP 19591216 198603 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. LANDASAN HUKUM	10
C. MAKSUD DAN TUJUAN	11
D. PROSES PENYUSUNAN REVIEW RENSTRA DINAS	11
E. HUBUNGAN RENSTRA DINAS PERTANIAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.....	12
F. SISTEMATIKA.....	13
BAB II KONDISI UMUM DAN TANTANGAN JANGKA MENENGAH.....	15
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD	15
B. SUMBER DAYA SKPD.....	16
C. KONDISI PERTANIAN DIY	18
D. TANTANGAN JANGKA MENENGAH	27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	32
A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	32
A.1. FAKTOR INTERNAL	32
1. KEKUATAN.....	32
2. KELEMAHAN.....	33
A.2. FAKTOR EKSTERNAL.....	33
1. PELUANG.....	33
2. ANCAMAN.....	34
B. TELAAH VISI DAN MISI RPJMD DIY 2012-2017	34
C. PENENTUAN ISU STRATEGIS	36
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	38
A. VISI DAN MISI DINAS PERTANIAN	38
1. VISI DINAS	38
2. MISI DINAS	40
B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH.....	41
1. TUJUAN.....	41
2. SASARAN	41
D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	42
A. STRATEGI/KEBIJAKAN	42
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	45
A. PROGRAM	45
B. KEGIATAN TAHUN 2012-2017	45
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENJADI SASARAN RPJMD	61
BAB VII PENUTUP.....	64

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perumusan kebijakan (*policy making*) yang baik merupakan titik awal keberhasilan pembangunan. Proses perumusan kebijakan diawali dari pengenalan posisi sebuah entitas, dalam hal ini Dinas Pertanian D. I. Yogyakarta, identifikasi serta pencermatan isu dan perubahan lingkungan strategis, arahan yang tidak ambigu dan peraturan yang transparan. Dengan posisi Dinas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, perumusan kebijakan mesti memadukan antara prinsip *top-down policy* dan prinsip *bottom-up planning*. Dengan kata lain, dalam proses ini mesti diperhatikan apa yang ingin dicapai Pemerintah Pusat dan apa kegiatan yang sesuai dengan kondisi daerah, agar tujuan yang akan dicapai sesuai dengan yang ditentukan.

Dalam siklus manajemen, perumusan kebijakan, perencanaan dan penganggaran seharusnya didasarkan atas hasil evaluasi. Secara umum, hasil evaluasi pembangunan pertanian selama ini belum secara optimal dimanfaatkan sebagai *input* penting bagi penyusunan kebijakan berikutnya atau sebagai langkah koreksi suatu kebijakan. Evaluasi merupakan runtutan kegiatan yang secara periodik dilakukan untuk *review* implementasi program/kegiatan. Hasil evaluasi juga dapat digunakan dalam penerapan *reward and punishment* bagi pelaksana kegiatan pada ranah operasional.

Kebijakan, program, dan kegiatan adalah formulasi dari solusi dan pola-pola operasionalisasi solusi tersebut terhadap permasalahan pembangunan yang teridentifikasi di lapangan.

Kinerja perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diukur dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2013 tercatat sebesar Rp 63,69 triliun. Nilai tersebut setara dengan Rp 24,57 triliun jika dihitung dengan

harga konstan tahun 2000 (PDRB riil). Dibandingkan dengan PDRB riil tahun 2012 yang mencapai Rp 23,31 triliun, maka kinerja perekonomian DIY selama tahun 2013 mampu tumbuh positif sebesar 5,40 persen

Pertumbuhan perekonomian DIY mencapai 5,40% pada tahun 2013 yang naik dari tahun sebelumnya dengan capaian 5,32%. Kondisi ini didorong oleh pertumbuhan positif di semua sektor perekonomian, terutama dengan andil sektor perdagangan, perhotelan dan restoran. Namun di sisi lain sektor pertanian menjadi lampu merah karena memiliki laju pertumbuhan terendah dan mengalami perlambatan. Sektor pertanian menjadi lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan terendah, meskipun masih tumbuh positif sebesar 0,63% dan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kinerja perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2014 yang diukur dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 5,2%. Pertumbuhan ini terjadi hampir disemua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 2,1%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar -13,4 persen serta pertambangan dan penggalian sebesar -2,7 persen

Isu strategis yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Strategis ini, antara lain:

1. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga status keistimewaan Yogyakarta diakui secara lebih jelas, lebih formal, dan lebih utuh
2. Kewenangan pemerintah daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014
3. Perubahan peta politik dan guncangan ekonomi dunia, namun pertanian tetap menjadi basis stabilitasnya

4. Ekonomi tidak harus yang terdepan, lebih dipentingkan *Human Development Index*, yang meliputi pendidikan, kesehatan, serta kecukupan papan, sandang dan pangan.
5. Perlu dihitung dan dirumuskan strategi luasan lahan pertanian produktif yang harus dipertahankan hingga 20 tahun ke depan
6. Perlu diangkat skenario baru keberpihakan Pemerintah kepada petani, melalui Subsidi Harga Produk, bukan sekedar subsidi input
7. *Integrated/mix farming*: tiap petani mengusahakan lahan, ternak dan kolam
8. *Organic farming*: menuju pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), untuk memenuhi kebutuhan petani sendiri dan komersial
9. *Functional food issues*: hidup sehat tanpa obat (antioksidan, flavonoid, pada sayuran dan buah-buahan)
10. Dampak perubahan iklim global.
11. Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 produk agribisnis harus mempunyai nilai tambah tinggi dan produk pertanian ke depan tidak lagi dijual berupa barang mentah.
12. Swasembada Pangan dalam waktu 3 tahun ke depan, sebagaimana kebijakan Nawa Cita Presiden Joko Widodo.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran dari rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah DIY. Renstra Dinas Pertanian merupakan rujukan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas program dan kegiatan tahunan Dinas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), di samping sebagai rujukan dalam penyusunan usulan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (APBN) serta sumber-sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

Rencana Strategis Dinas Pertanian juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Oleh karena

itu muatan utama Renstra adalah semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas dalam konteks akuntabilitas kinerja dan manajerial yang mencakup kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD, dana dekonsentrasi, serta sumber dana lain yang tidak mengikat (Surat Edaran Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 050/1240/II/Bangda, Tanggal 21 Juni 2001). Renstra akan menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Dinas pada setiap akhir tahun anggaran.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian DIY 2012-2017 didasarkan pada landasan ideologis Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan landasan operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
12. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian;
13. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur RPJMD 2012-2017.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Review Renstra Dinas Pertanian DIY disusun dengan maksud menyediakan acuan kerja penyelenggaraan pembangunan pertanian di DIY selama rentang waktu dua tahun, serta bertujuan untuk:

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
2. Menjamin komitmen pada program dan kegiatan yang sudah disepakati secara partisipatif antar semua pemangku kepentingan pembangunan pertanian;
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
4. Menyediakan tolok banding (*benchmark*) dalam pengukuran kinerja Kepala Dinas.

D. PROSES PENYUSUNAN REVIEW RENSTRA DINAS

Penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Pertanian dilakukan dengan melibatkan seluruh pilar pelaku pembangunan yang meliputi aparatur

Pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta atau dunia usaha, serta petani/kontak tani di DIY, melalui tahap-tahap berikut:

1. Penyiapan konsep *draft Review* Rencana Strategis Dinas Pertanian DIY Tahun 2012-2017;
2. Penggalangan masukan dan perbaikan dari berbagai lapisan masyarakat pelaku pembangunan pertanian, melalui *brainstorming*, seminar, dan koordinasi perencanaan pembangunan pertanian tingkat kabupaten/ kota dan ;
3. Konsultasi dengan narasumber untuk memperoleh referensi akademik dalam penyempurnaan penyusunan Review Renstra Pertanian.

E. HUBUNGAN RENSTRA DINAS PERTANIAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2012-2017 berkedudukan sebagai kerangka dasar manajemen pembangunan sektor pertanian di DIY yang mencerminkan aspirasi masyarakat pertanian, dipadukan dengan *top down policy* dari Pemerintah Pusat, dan penjabaran dari amanat RPJM dan RPJP DIY. Oleh karenanya, Renstra Dinas Pertanian mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2012-2017;
5. Rencana Strategis SKPD Kabupaten

Dengan demikian, Renstra Dinas Pertanian merupakan hasil integrasi dari rencana-rencana pembangunan Pusat maupun regional sektor pertanian dan terkait pertanian. Renstra Pertanian berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan sektor pertanian di DIY selama rentang waktu 2012-2017 hingga tingkat kabupaten/kota.

F. SISTEMATIKA

Review Rencana Strategis 2012-2017 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

berisi Latar Belakang, Pengertian, Posisi Dinas Pertanian DIY, Proses Penyusunan Renstra Dinas, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Renstra Dinas Pertanian dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan

BAB II. KONDISI UMUM DAN TANTANGAN JANGKA MENENGAH

menguraikan tupoksi Dinas Pertanian, keadaan SDM dan sarana prasarana, kondisi pertanian secara umum di DIY, masalah yang dihadapi dan tantangan yang mesti dijawab dalam pembangunan pertanian

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

merinci sejumlah faktor penting yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan kinerja pembangunan pertanian di DIY, menjelaskan nilai-nilai dasar, paradigma, atau filosofi pembangunan daerah yang menjiwai keseluruhan proses pembangunan sektor pertanian, visi pembangunan daerah dan misi pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang sedang berkembang dan akan tetap muncul selama periode 2 tahun kedepan

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

menjelaskan nilai-nilai dasar, paradigma, atau filosofi pembangunan Dinas Pertanian yang menjiwai keseluruhan proses pembangunan sektor pertanian, visi pembangunan daerah, visi pembangunan pertanian, visi Dinas Pertanian DIY, merinci tujuan kualitatif dan sasaran kuantitatif yang hendak diwujudkan dalam pembangunan pertanian, menguraikan cara-cara sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian, tahapan serta prioritas implementasi program dan kegiatan tahunan selama lima tahun masa pelaksanaan Rencana Strategis ini

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

menjelaskan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target sesuai indikator kinerja yang telah direncanakan

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENJADI SASARAN RPJMD

merinci indikator dan target kinerja Dinas Pertanian selama 2 tahun kedepan

BAB VII. PENUTUP

BAB II**KONDISI UMUM DAN TANTANGAN JANGKA MENENGAH****A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah DIY dan Peraturan Gubernur Nomor : 38 Tahun 2008 Bab II Pasal 2 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pertanian DIY adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Pertanian DIY diberikan tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian DIY menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program dan pengendalian bidang pertanian.
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian.
- 3) Pelaksanaan, Pengembangan, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, peternakan.
- 4) Pelaksanaan koordinasi perizinan di bidang pertanian.
- 5) Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya.
- 6) Pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang pertanian kabupaten/ kota.
- 7) Penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian lintas kabupaten/ kota
- 8) Pemberdayaan sumber daya pertanian dan mitra kerja di bidang pertanian
- 9) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pertanian DIY sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanian yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah DIY dan Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor : 38 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian yang menyebutkan bahwa struktur Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas seorang Kepala Dinas dibantu oleh:

1. Sekretariat
2. Bidang Tanaman Pangan
3. Bidang Tanaman Hortikultura
4. Bidang Peternakan
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yaitu :
 - a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
 - b. Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - d. Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan;
 - e. Balai Proteksi Tanaman Pertanian;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. SUMBER DAYA SKPD

Pendataan pegawai lingkup Dinas Pertanian DIY pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Kantor Dinas Pertanian Provinsi DIY :
 - a. Sekretariat : 52 orang
 - b. Bidang Tanaman Pangan : 20 orang
 - c. Bidang Tanaman Hortikultura : 20 orang
 - d. Bidang Peternakan : 20 orang
 - e. Bidang P2HP : 22 orang

2. UPTD BPBPTDK	: 46 orang
3. UPTD BPSDMP	: 44 orang
4. UPTD BPSBP	: 42 orang
5. UPTD BPTP	: 63 orang
6. UPTD BP2TPH	: 49 orang

Jumlah	: 378 orang

Dari jumlah pegawai yang ada di Dinas Pertanian DIY sebanyak 402 orang tersebut didalamnya termasuk :

1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	: - orang
2. Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat	:
⇒ Pengawas Benih Tanaman (PBT)	: 23 orang
⇒ Pengendali OPT (POPT)	: 34 orang
⇒ Pengawas Bibit Ternak (PBT)	: 4 orang
⇒ Medik Veteriner	: 5 orang
⇒ Paramedik Veteriner	: 2 orang
⇒ Widyaiswara	: 8 orang

Keadaan sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pertanian DIY dalam mendukung kegiatan Dinas adalah sebagai berikut :

Untuk menunjang dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dinas Pertanian DIY telah mempunyai beberapa jaringan komunikasi elektronik yang terdapat di masing-masing Bidang, Sekretariat dan UPTD yaitu:

1. Dinas Pertanian DIY (Sekretariat), dengan pesawat telepon nomor: (0274) 563937, (0274) 588938 dan (0274) 519530.
2. Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Tanaman Hortikultura dengan pesawat telepon nomor: (0274) 511031 dan (0274) 561030.
3. Bidang Peternakan dengan pesawat telepon nomor: (0274) 511001 dan (0274) 586516.

4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dengan pesawat telepon nomor: (0274) 544901.
5. UPTD BPPTPH , dengan pesawat telepon nomor: (0274) 895357, (0274) 517004, (0274) 561973, (0274) 773844, (0274) 7101535, (0274) 7104458, (0274) 7499212, dan (0274) 392040.
6. UPTD BPTP, dengan pesawat telepon nomor: (0274) 561492, dan (0274) 586532, (0274) 582889, dan (0274) 367029.
7. UPTD BPSBP, dengan pesawat telepon nomor: (0274) 566687.
8. UPTD BPBPTDK, dengan pesawat telepon nomor: (0274) 7102133, (0274) 897006.

Selain alat komunikasi tersebut, Dinas Pertanian DIY juga telah memiliki dua jaringan internet di Sekretariat dan Bidang Tanaman Pangan, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan data dan informasi bagi yang membutuhkan.

Untuk menunjang operasional kegiatan sehari-hari sebagian pegawai Dinas Pertanian DIY menggunakan fasilitas kendaraan dinas.

C. KONDISI PERTANIAN DIY

1. Kondisi Umum

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis bagi DIY. Sektor pertanian memegang peranan penting yaitu sebagai sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja, dan juga pemberi input bagi sektor industri. Bagi DIY, sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB DIY yang menempati posisi ketiga setelah sektor jasa-jasa serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dalam rentang waktu 2008- 2013 kontribusi sektor pertanian DIY cenderung mengalami penurunan. Akibat kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan laju 0,42% per tahun. Meskipun alih fungsi lahan lebih

banyak terjadi pada lahan marginal tadah hujan dengan frekuensi tanam dan produktivitas rendah, hal ini tetap merupakan tantangan cukup berarti dalam pembangunan sektor pertanian ke depan.

Kondisi tahun 2013, luas lahan pertanian di DIY adalah 318.580 ha yang terdiri dari lahan sawah seluas 56.327 ha dan lahan bukan sawah dan bukan pertanian 262.253 ha. Dari luas lahan bukan sawah dan bukan pertanian seluas 262.253 ha dapat dirinci menjadi lahan pertanian bukan sawah seluas 183.739 ha dan lahan bukan pertanian 78.514 ha.

Lahan sawah terluas berada di Kabupaten Sleman, yaitu 22.623 ha diikuti oleh Kabupaten Bantul 15.471 ha, Kabupaten Kulon Progo 10.297 ha, Kabupaten Gunungkidul 7.865 ha sedangkan di Kota Yogyakarta luas lahan sawah hanya sebesar 71 ha.

Lahan pertanian bukan sawah terluas berada di Kabupaten Gunungkidul, yaitu 117.829 ha diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo seluas 35.027 ha, Kabupaten Sleman seluas 16.567 ha, Kabupaten Bantul seluas 14.125 ha, dan Kota Yogyakarta seluas 191 ha.

Sementara itu, lahan bukan pertanian seluas 78.514 ha yang terbagi menjadi lahan untuk pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, rawa-rawa, hutan negara, dan lainnya (jalan, sungai, danau, lahan tandus dan lain-lain).

Kawasan peruntukan pertanian dibagi menjadi lahan basah dan lahan kering. Kebijakan pada kawasan pertanian lahan basah antara lain adalah:

- a. melestarikan kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, menjaga ketersediaan lapangan kerja di bidang pertanian, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup;
- b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Kebijakan pada kawasan pertanian lahan kering diantaranya adalah:

- a. melestarikan kawasan pertanian lahan kering sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi;
- b. mengembangkan kawasan pertanian lahan kering untuk diversifikasi sumber pangan, dan sumber energi serta untuk menciptakan peluang ekonomi;
- c. mengoptimalkan produktifitas kawasan pertanian lahan kering;
- d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, kecuali untuk kepentingan umum.

DIY dalam rangka melindungi lahan pertanian berkelanjutan dan dalam rangka mendukung ketahanan pangan telah mempunyai Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Adapun Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam RTRW Daerah ditetapkan dengan luas palingkurang 35.911,59 Ha (merupakan lahan inti). Lahan diluar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan penyangga.

Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tersebar di wilayah:

- a. Kabupaten Sleman dengan luas paling kurang 12.377,59 Ha;
- b. Kabupaten Bantul dengan luas paling kurang 13.000 Ha;
- c. Kabupaten Kulon Progo dengan luas paling kurang 5.029 Ha; dan

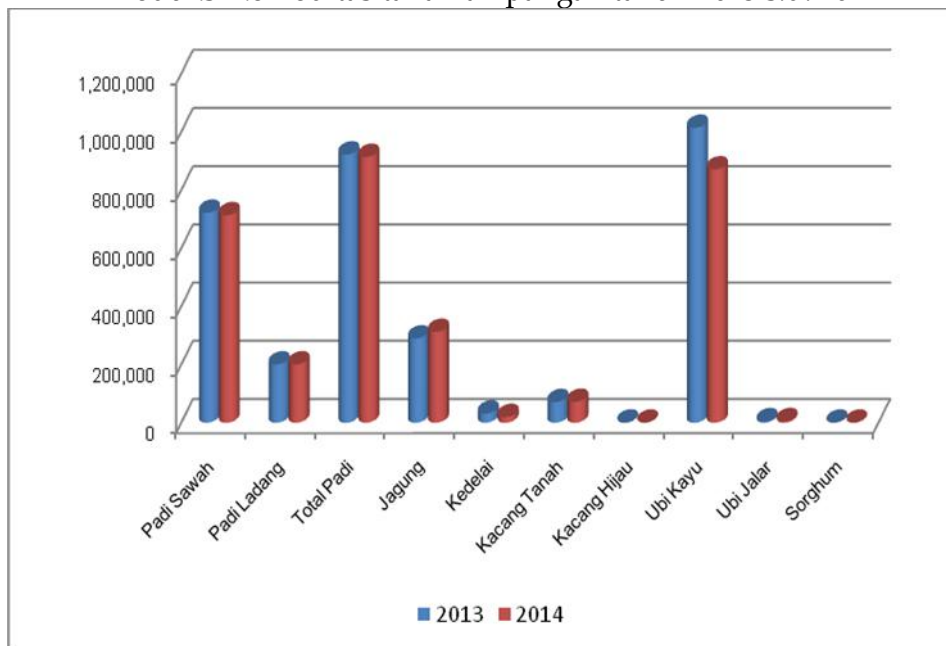
d. Kabupaten Gunungkidul dengan luas paling kurang 5.505 Ha.

Pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan tidak terlepas atas kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu ketahanan atau kedaulatan pangan. Pasokan pangan suatu wilayah sangat bergantung pada ketersediaan dari aspek produksi dan konsumsi masyarakat dalam wilayah tersebut, termasuk komoditas yang dibudidayakan untuk mendukung konsumsi pangan setempat. Data menunjukkan produktivitas sub sektor tanaman pangan di DIY mempunyai kecenderungan meningkat untuk komoditas padi ladang, jagung, kacang hijau dan ubi jalar. Sedangkan data produksi komoditas tanaman pangan cenderung turun disebabkan karena faktor perubahan iklim.

Penurunan produksi yang significant terjadi pada komoditas tanaman ubi kayu. Secara khusus pertanaman ubi kayu utamanya di Kabupaten Gunungkidul ditanam secara tumpang sari. Sejak tahun 2013 dan berlanjut tahun 2014 masih dilakukan dengan cara tumpang sari, tetapi dengan jarak tanam yang lebih lebar dan melebihi tiga kali jarak tanam. Berdasar metodologi penghitungan BPS, apabila pertanaman melebihi 3 kali jarak tanam normal, maka tidak dihitung sebagai pertanaman yang menghasilkan produksi khususnya ubi kayu. Dengan adanya kejadian tersebut mengakibatkan luas tanam dan luas panen menurun dan berdampak pada penurunan produksi ubi kayu.

Produksi komoditas tanaman pangan unggulan DIY tahun 2013-2014 ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 1.
Produksi komoditas tanaman pangan tahun 2013 s.d. 2014



Sumber : Dinas Pertanian DIY

Wilayah DIY juga merupakan sentra tanaman sayuran terutama untuk komoditas bawang merah dan cabai besar. Kedua komoditas tersebut memiliki luasan panen terluas dari total 18 komoditas sayuran di DIY atau memiliki besaran areal sebesar 47%. Untuk bawang merah sebagian besar menjadi komoditas unggulan daerah Bantul (85%). Sedangkan untuk komoditas cabe besar menjadi sentra pada wilayah Kulonprogo (41,35%), Sleman (32,65%), dan Bantul (17,69%). Peningkatan luas panen yang berdampak pada peningkatan produksi menunjukkan bahwa secara agro-klimatologi, wilayah DIY secara umum memiliki kesesuaian untuk pengembangan komoditas sayuran dengan dukungan lahan yang subur, ketinggian yang memadai, curah hujan yang cukup, dan iklim/temperatur yang cocok.

Peningkatan angka-angka produksi merupakan hasil dari berbagai upaya dan kegiatan pembangunan pertanian, antara lain:

1. Peningkatan luas panen dan produktivitas;

2. Perguliran dana bantuan benih dan sarana produksi serta perbaikan sarana irigasi dalam rangka *recovery* pasca bencana maupun upaya khusus melalui program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN);
3. Penyaluran bantuan benih melalui skema subsidi antara lain Cadangan Benih Nasional (CBN), Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), dan Upaya Khusus;
4. Penyaluran bantuan pupuk.

Potensi komoditas buah-buahan dijumpai pada semua kabupaten/kota di DIY. Setidaknya terdapat 21 komoditas buah-buahan yang dibudidayakan di wilayah DIY. Sebagaimana komoditas sayuran, sebagian besar komoditas buah-buahan banyak dijumpai pada Kabupaten Sleman dan Kulon Progo. Komoditas salak merupakan andalan pada Kabupaten Sleman dan buah pisang menjadi tanaman andalan bagi Kabupaten Kulon Progo.

Sementara itu untuk sub sektor peternakan, wilayah DIY memiliki sebaran ternak besar maupun kecil pada sejumlah kabupaten dan kota. Untuk ternak besar pada wilayah DIY, sebagian besar atau 99% terdiri atas jenis sapi potong, kambing, dan domba. Pertumbuhan populasi ternak menunjukkan angka negatif pada tahun 2013 sebesar 6,77%. Penurunan populasi ternak tahun 2013 disebabkan :

1. Terjadinya pengeluaran ternak ke luar daerah (jabodetabek) terutama untuk komoditas sapi potong, padahal untuk komoditas sapi potong ini memiliki nilai animal unit yang besar sehingga menyebabkan penurunan populasi di tahun 2013
2. Pemasukan ke DIY maupun kelahiran tidak seimbang dengan pengeluaran dan pemotongan ternak di DIY khususnya sapi potong, untuk sapi siap potong membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun sehingga kelahiran tidak dapat menutupi ternak yang keluar daerah maupun yang dipotong
3. Pemotongan sapi di DIY banyak yang tidak memenuhi standart berat potong (450 kg) sehingga untuk memenuhi permintaan daging sapi membutuhkan jumlah sapi yang lebih banyak untuk dipotong

4. Program IB hasilnya masih rendah yaitu S/C lebih dari 2 untuk idealnya 1,75 - 2
5. Interval kelahiran masih cukup tinggi antara 1,8 - 2 tahun, idealnya 15 bulan
6. Induk-induk sapi potong yang ada di peternak 80 % sapi persilangan simpo (simental-PO) atau Limpo (limosin-PO) sehingga perlu membutuhkan pemeliharaan yang intensif untuk mendapatkan performa reproduksi yang baik
7. Adanya penyakit gangguan reproduksi pada induk-induk sapi (± 20 %)
8. Masih munculnya penyakit Flu Burung (AI) pada ternak unggas (ayam buras dan itik)

Sedangkan pertumbuhan populasi ternak pada tahun 2014 menunjukkan angka positif sebesar 6,69%. Meskipun terjadi pertumbuhan populasi tetapi capaian realisasi jumlah populasi masih belum mencapai target sasaran indikator kinerja dikarenakan :

- Adanya sensus pertanian tahun 2013 (ST 2013) yang dilakukan secara nasional oleh BPS RI dimana hasil ST 2013 menunjukkan turunnya populasi ternak (khususnya sapi) secara nasional dengan rerata 20 %
- Hasil ST 2013 harus digunakan sebagai data dasar perhitungan populasi ternak tahun berikutnya (sebagai Po)
- Angka hasil ST 2013 populasi ternak sebesar : 558.526 AU

Efisiensi usaha tani akan dapat tercapai apabila produksi yang tinggi tersebut dapat diimbangi dengan biaya produksi yang sekecil mungkin dengan peluang pasar yang baik serta dicapai tingkatan dengan harga yang wajar. Dengan berbagai keterbatasan terkait potensi sumber daya alam yang ada di DIY maka langkah strategis yang harus diupayakan adalah mendorong tercapainya peningkatan produktifitas dan mutu produk yang memadai sehingga daya saing produk memenuhi permintaan pasar.

Selain itu, hal terpenting dalam merevitalisasi sektor pertanian untuk mendukung memperkuat daya saing produk pertanian adalah meningkatkan kapasitas SDM (sumberdaya manusia) dan meningkatkan kelembagaan sektor pertanian. Kualitas SDM sektor pertanian yang kurang memadai, menjadi persoalan yang harus ditangani secara berkelanjutan melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan jiwa kewirausahaan, dan pendampingan penyuluhan. Untuk itu, penguatan kelembagaan pertanian perlu disokong sepenuhnya dengan dukungan permodalan yang terjangkau, fasilitasi sarpras secara tepat, pemberdayaan petani muda bermental wirausaha, pemberdayaan wanita tani, pelatihan, ketersediaan informasi pertanian yang memadai, sentuhan teknologi yang aplikatif, dan skim jejaring pemasaran yang tepat.

Penguatan kelembagaan pertanian harus seiring pula dengan pola pendampingan berupa penyuluhan yang memadai. Dukungan penyuluhan yang memadai menjadi salah satu prioritas yang mendukung penguatan SDM pertanian beserta kelembagaannya, melalui penguatan sumberdaya penyuluh, termasuk kelembagaannya, baik penyuluh PNS, TH-TBPP, maupun penyuluh swadaya. Keberhasilan penyuluh melakukan pendampingan secara berkelanjutan menjadi salah satu kunci sukses dalam menggerakkan sektor pertanian menuju arah yang lebih baik menuju peningkatan daya saing.

Kinerja sektor pertanian tercermin pada capaian indikator pertanian diantaranya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas tanaman pertanian. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya. NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani.

Perkembangan indeks harga yang diterima petani (It), indeks harga yang dibayar (Ib) dan NTP di Provinsi DIY selama tahun 2008-2013 menunjukkan pola

yang semakin meningkat. Secara umum, nilai It rata-rata selama periode 2008-2013 selalu lebih tinggi dari nilai Ib. Kenaikan indeks yang tertinggi terjadi pada kelompok tanaman pangan dan kelompok perkebunan rakyat. Sementara, kelompok peternakan dan perikanan memiliki kenaikan indeks terendah. Dari sisi level, nilai It tertinggi dimiliki kelompok hortikultura terutama pada komoditas sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenaikan It yang lebih tinggi dari kenaikan Ib akan berakibat pada peningkatan NTP. Perkembangan NTP rata-rata di DIY selama periode 2008-2013 (2007=100) semakin menunjukkan peningkatan dari 105,28 di tahun 2008 menjadi 116,39 di bulan November 2013. Secara kasar, hal ini merepresentasikan kesejahteraan petani yang meningkat, karena dengan indeks harga yang diterima lebih tinggi dari harga yang dibayar nilai produksi hasil pertanian menjadi lebih besar dengan asumsi komoditas yang harganya meningkat banyak dibudidayakan oleh petani di DIY.

Pola perkembangan NTP bulanan di DIY cukup berfluktuasi dengan nilai di atas 100 dan ada kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2010, nilai NTP mencapai puncak selama bulan Agustus dan terendah di bulan Februari. Pola selama tahun 2011 dan 2012 sedikit mengalami perubahan dan mencapai puncak selama bulan Oktober dan terendah di bulan Maret berkaitan dengan nilai inflasi barang-dan jasa yang cukup tinggi. Hal ini sangat ironis, karena bulan Maret masih menjadi bulan puncak panen tanaman padi dan palawija.

Pola di tahun 2013, nilai rata-rata It tercatat sebesar 163,16, sementara nilai Ib tercatat sebesar 139,59 sehingga nilai NTP 2013 tercatat sebesar 116,89. Nilai NTP yang berada di atas 100 menggambarkan kesejahteraan penduduk secara kasar yang meningkat

Data perkembangan NTP tahun 2009-2013 menunjukkan terjadi peningkatan nilai NTP di DIY untuk semua sub sektor pertanian kecuali hortikultura dan peternakan. Pada kondisi tahun 2009-2013 penghitungan NTP masih menggunakan angka dasar tahun 2007. Kemudian mulai bulan Desember 2013 penghitungan NTP menggunakan angka dasar tahun 2012 sebagaimana tercatat di Berita Resmi Statistik

DIY periode bulan Februari 2014. Perubahan angka dasar disebabkan perbedaan angka konsumsi tahun 2012 dengan tahun 2007. Hal ini berakibat pada menurunnya NTP pada tahun 2014 pada semua sub sektor.

Tabel 1
Nilai Tukar Petani dan sub sektor pendukungnya di DIY
2009-2014

NTP Sektor/Sub sektor	Tahun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NTP Pertanian	104,62	110,29	113,89	116,50	117,25	102,20
NTP Pertanian Pangan	102,88	109,45	113,52	117,11	115,96	96,88
NTP Hortikultura	103,64	117,56	127,30	128,96	133,19	97,86
NTP Perkebunan Rakyat	118,11	115,90	121,44	123,62	127,25	114,73
NTP Peternakan	107,24	106,16	103,66	103,79	106,51	103,60
NTP Perikanan	110,18	112,28	112,69	113,79	116,31	113,59

Sumber : analisa data BPS DIY

D. TANTANGAN JANGKA MENENGAH

Dalam rentang waktu hingga tahun 2017, masih akan dihadapi sejumlah tantangan, sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk DIY yang terus meningkat, membawa konsekuensi sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kebutuhan pangan, sehingga sektor pertanian dituntut untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan melalui penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan berimbang;
 - b. Rendahnya diversifikasi konsumsi menyebabkan kebutuhan bahan pangan pokok menjadi makin tinggi. Hal ini akan menjadi ancaman bagi dunia pertanian, karena petani harus selalu memproduksi bahan pangan. Ancaman ini perlu diubah menjadi peluang bagi petani dengan menciptakan pangan alternatif yang berkualitas;
 - e. Terbentuk pasar yang luas bagi produk-produk pertanian. Melalui penguasaan informasi pasar, petani dapat mengusahakan komoditas sesuai dengan preferensi konsumen. Pasar bebas yang sudah mulai terasa

pengaruhnya terhadap produk pertanian/peternakan, hendaknya dapat disikapi secara nyata dengan sentuhan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk lokal serta meningkatkan efisiensi, sehingga produk lokal tetap mampu menembus pasar, baik di wilayah sendiri maupun bersaing di pasar regional dan global.

2. Pengembangan sumber energi yang terbarukan banyak memanfaatkan produk-produk pertanian, seperti jagung dan ketela pohon. Di masa datang akan terjadi kompetisi penggunaan produk pertanian yaitu sebagai bahan pangan manusia, bahan industri pakan ternak dan bahan baku industri bio energi. Beban penyediaan produk pertanian akan semakin berat seiring besarnya tuntutan kebutuhan akan produksi di tiga sektor tersebut;
3. Akhir-akhir ini sejumlah pihak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan besar dengan mengabaikan kepentingan orang lain. Misalnya, peredaran pupuk palsu, penambahan zat pemutih pada beras, peredaran daging glonggongan, daging daur ulang, susu bermelamin dan masih banyak lagi pemalsuan lainnya. Dunia usaha dituntut dapat mewujudkan usaha yang berbudaya dan bermoral, dibarengi dengan upaya-upaya menggalang *public awareness*;
4. Arus masuk produk pertanian sedemikian deras dari luar DIY disertai dengan kecanggihan promosi, menempatkan produk pertanian Indonesia, khususnya DIY pada posisi yang amat sulit, bahkan untuk menjadi tuan rumah di daerah sendiri;
5. Pewilayahan (*zoning*) komoditas unggulan, andalan, dan potensial yang telah terformulasi melalui proses identifikasi yang panjang tidak diikuti rekomendasi yang tegas (*imperatif*) bagi implementasinya pada tingkat petani, sehingga penggunaan lahan acap kali keluar dari peruntukan idealnya. Hal ini menyebabkan produktivitas lahan menurut komoditas tidak maksimal. Di

samping itu, pilihan budidaya yang tidak rasional, tanpa didasarkan pada prediksi perilaku pasar mengakibatkan penumpukan produksi jauh melebihi daya serap pasar pada saat panen. Penetapan *quota* belum menjadi sesuatu yang dipandang urgen dalam menjaga posisi petani pada situasi tarik ulur antara permintaan (*demand*) dengan penawaran (*supply*);

6. Dari segi *economy of scale*, petani skala kecil D.I. Yogyakarta dengan posisi tawar yang lemah harus berhadapan dengan industri pangan skala besar yang lebih bersifat padat modal dan padat teknologi (*capital and technology intensive*). Keadaan ini menjadi lebih kompleks dengan sulitnya penetrasi produk pertanian ke swalayan, toko serba ada, mal dan pusat-pusat belanja keluarga (*one stop shop*), karena pemilik toko-toko tersebut selalu berhasil memaksakan pola *consignment* dalam pemasaran produk pertanian;
7. Air merupakan faktor utama dalam budidaya pertanian. Seperti halnya penggunaan lahan, dengan semakin pesatnya pembangunan berbagai sektor sumberdaya air bagi pertanian juga semakin terbatas. Sumberdaya air ini mengandalkan debit air Sungai Progo yang berhulu di wilayah Jawa Tengah. Sumberdaya air utama bagi lahan kering adalah curah hujan yang lebih sering sulit diprediksi baik volume maupun intensitasnya. Di samping itu, sumberdaya air bawah tanah, yang di beberapa titik sudah dilakukan penggalian melalui kerja sama dengan negara lain, belum bisa didayagunakan untuk pemanfaatan optimal dalam usaha tani;
8. Budidaya pertanian di DIY tergantung pada musim yang berakibat akan selalu terjadi masa tanam dan masa panen yang hampir bersamaan. Akibatnya berlaku hukum pasar, di mana barang tersedia melimpah dengan permintaan yang tetap maka akan terjadi penurunan harga barang secara alami. Disamping itu produk pertanian umumnya bersifat *bulky* dan mudah rusak (*perishable*), termasuk di dalamnya produk yang berasal dari peternakan seperti daging, telur dan susu. Dan seperti lazimnya petani di daerah lain, para petani di Yogyakarta pada

umumnya melakukan usaha tani turun-temurun, sehingga pilihan jenis usaha tani yang diusahakan tidak berdasarkan pada kebutuhan pasar. Akibatnya peluang yang terus berkembang tidak dapat ditangkap dengan baik untuk optimasi usahatani;

9. Peluang bagi peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan melalui peningkatan produktivitas masih terbuka karena adanya perkembangan teknologi budidaya yang sesuai dengan prinsip *good agriculture practices* (GAP). Selain itu, berdasarkan *impact point* yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat penggunaan teknologi oleh petani masih belum sesuai dengan anjurannya. Oleh karena itu jika hal ini diperbaiki akan memberikan peluang yang cukup bagi peningkatan produksi per satuan luas;
10. Peluang untuk memberikan nilai tambah bagi produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di tingkat petani sangat besar, terutama teknologi bercorak *good handling practices* (GHP) atau *good manufacturing practices* (GMP). Selama ini petani di Yogyakarta sangat banyak yang menjual produknya dalam bentuk primer tanpa memberikan sentuhan teknologi untuk menjadi bahan setengah jadi. Akibatnya nilai tambah produk pertanian tanaman pangan/peternakan dinikmati oleh pelaku yang lain, dalam hal ini bukan petani/peternak;
11. Paradigma petani khususnya peternak di DIY sudah banyak yang bergeser yang dulu bersifat tradisional ataupun sekedar hobi dalam memelihara ternak hanya untuk tabungan "raja kaya" tetapi sekarang sudah mengarah ke wawasan pola usaha agribisnis dengan mengedepankan perhitungan untung rugi;
12. Terjadinya penurunan produktivitas (*levelling off*) lahan dengan masa eksploitasi yang panjang. Penggunaan pupuk kimia khususnya urea dalam jangka waktu yang panjang dan dalam dosis yang berlebihan akan berakibat menurunnya

kualitas struktur kandungan unsur hara tanah. Perlu dilakukan pembatasan penggunaan pupuk anorganik dan dibarengi dengan peningkatan pemanfaatan pupuk organik;

13. Akibat dari pemanasan global dimungkinkan terjadi anomali iklim dan perubahan kualitas lingkungan yang sulit diprediksi. Hal ini harus disosialisasikan dan diupayakan meminimalkan kemungkinan kerugian yang akan timbul dari perubahan alam tersebut;
14. Regulasi perdagangan global yang mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus mempunyai atribut aman konsumsi (*food safety attribute*), mempunyai kandungan nutrisi tinggi (*nutritional attributes*), dan ramah lingkungan (*eco-labelling attributes*);
15. Perubahan pola kehidupan masyarakat, di mana orang semakin menyadari akan pentingnya kaitan kesehatan dan kebugaran dengan konsumsi makanan yang berakibat pada peningkatan tuntutan konsumen akan kandungan nutrisi dari produk-produk yang sehat, aman, dan menunjang kebugaran;
16. Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) produk agribisnis harus mempunyai nilai tambah tinggi dan produk pertanian ke depan tidak lagi dijual berupa barang mentah;
17. Menurunnya SDM di sektor pertanian (Sensus Pertanian 2013) dikarenakan generasi muda lebih memilih bekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sehingga perlu upaya terobosan di sektor agribisnis untuk menambah minat generasi muda bergerak di sektor pertanian.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A.1. FAKTOR INTERNAL

Tinjauan internal bertujuan untuk memahami kondisi Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya.

1. KEKUATAN

- a. Tugas dan fungsi Dinas Pertanian secara substantif adalah untuk pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat pertanian melalui perbaikan pendapatan, peningkatan produktivitas, efisiensi, pemberdayaan dan pemandirian petani;
- b. Dengan adanya perbedaan urusan wajib dan pilihan, aparatur Dinas tidak membedakan kualitas penanganan terhadap berbagai permasalahan pada sektor pertanian;
- c. Koordinasi internal dan dengan instansi terkait Dinas rutin diadakan;
- d. Dinas cukup responsif terhadap kebutuhan petani;
- e. Pendidikan SDM Dinas tinggi, dengan pengalaman memadai;
- f. Tersedia banyak peluang promosi produk pertanian melalui pameran dan berbagai ekspo;
- g. Sistem informasi cukup bagus, baik piranti lunaknya maupun ketersediaan data pertanian;
- h. Tersedia insentif bagi peningkatan kualitas SDM melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, magang dan kunjungan ke luar negeri.

2. KELEMAHAN

- a. Keterbatasan lahan dan laju alih fungsi lahan yang tinggi menyebabkan berkurangnya lahan pertanian produktif, tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, sebesar 2% per tahun rata-rata sekitar 250 ha/per tahun;
- b. Angka kemiskinan di DIY khususnya di beberapa wilayah masih cukup tinggi yang sebagian besar merupakan masyarakat petani;
- c. Keterbatasan potensi SDA di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya pertanian.

A.2. FAKTOR EKSTERNAL

Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan pertanian. Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional.

1. PELUANG

- a. Petani DIY sangat apresiatif terhadap pelayanan Dinas, sehingga proses pemandirian petani lebih mudah dilaksanakan;
- b. Petani mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga mampu memaksimalkan manfaat setiap fasilitasi dari Dinas;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengakses langsung data dan informasi Dinas;
- d. Terjalannya kerjasama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi) dalam hal pengembangan sistem informasi;
- e. Mudah nya koordinasi dengan mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan;

- f. Adanya kerja sama dan terjadinya transfer ilmu dengan mitra kerja, termasuk dengan akademisi dan aparatur penelitian dan pengembangan;
- g. Tersedianya program beasiswa untuk SDM Dinas;
- h. Masyarakat yang makin kritis menjadi tantangan untuk selalu meningkatkan kualitas kinerja pelayanan bagi aparat Dinas;
- i. Dukungan Pemerintah Pusat yang cukup signifikan dalam bentuk pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan APBN;
- j. Kewenangan Dinas Pertanian sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 23 tahun 2014.

2. ANCAMAN

- a. Kondisi geografis DIY yang rentan terhadap bencana (erupsi gunung Merapi, gempa bumi, kekeringan, longsor dan angin puting beliung dll).
- b. DIY tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim yang serius ditandai dengan meningkatnya suhu lingkungan akibat pemanasan global (*global warming*), meningkatnya permukaan air laut yang menyebabkan muka air laut meninggi, meningkatnya emisi gas rumah kaca karena rusaknya lapisan ozon.
- c. Faktor kenyamanan juga menyebabkan nilai tanah menjadi tinggi dan prospek bagus bagi pengembang sehingga menyebabkan nilai tanah tidak terkendali, pada saat yang sama menyebabkan konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian semakin meningkat.
- d. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015

B. TELAAHAN VISI DAN MISI RPJMD DIY 2012-2017

Filosofi yang dimaksud dalam konteks ini adalah nilai-nilai dasar (*basic values*), paradigma pembangunan daerah yang juga menjiwai keseluruhan proses pembangunan sektor pertanian di DIY. Filosofi pembangunan daerah

DIY, *Hamemayu Hayuning Bawana*, merupakan formulasi cita-cita luhur untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. *Hamemayu hayuning bawana* mengimplisitkan makna kewajiban melindungi, memelihara serta membina keselamatan dunia; mementingkan karya dan darma bakti bagi masyarakat dibanding memenuhi ambisi pribadi atau golongan. Dengan dua kalimat yang melatarbelakangi filosofi ini, yaitu "*mangasah mingising budi, memasuh malaning bumi*" sebagaimana pernah disabdakan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma, makna kekinian dari filosofi pembangunan daerah tersebut adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat, di atas topangan profesionalisme dan humanisme.

Filosofi di atas melahirkan visi yang hendak diwujudkan dalam rentang lima tahun ke depan, berupa suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi nilai budaya adiluhung.

RPJMD tahun 2012-2017 berada pada transisi ditahapan lima tahun kedua (2010-2014) dan ketiga (2015-2019) dalam tata waktu RPJPD DIY. Penekanan pada lima tahun kedua adalah pada pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect and forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan. Lima tahun ketiga mempunyai penekanan pada pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan perkembangan global yang pesat, visi pembangunan daerah Pemerintah DIY dirumuskan sebagai berikut: "*Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru*"

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
2. Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Pembangunan pertanian sesuai dengan RPJMD masuk dalam misi kedua yaitu memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. Misi memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif.

C. PENENTUAN ISU STRATEGIS

1. Produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dalam rangka berkontribusi pada pencapaian swasembada nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan;
2. Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
3. Agribisnis pertanian yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal;

4. Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang, antara lain dikarenakan menurunnya minat generasi muda bekerja pada sektor pertanian.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI DINAS PERTANIAN

1. VISI DINAS

Pembangunan pertanian, termasuk di dalamnya pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan sub-sub sektor pendukungnya, menjadi tanggung jawab empat pilar, yaitu Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, dan Masyarakat. Peran Pemerintah dalam pembangunan pertanian dilaksanakan pada pengembanan tugas dan fungsi Dinas Pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan pada terwujudnya pertanian yang bersifat komersial dan efisien, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengetahuan dan teknologi tepat, yang berimplikasi pada peningkatan nilai tambah dan perbaikan pendapatan.

Dari hasil pencermatan terhadap kondisi sektor pertanian DIY dan berbagai isu strategis, visi pembangunan pertanian DIY dapat dirumuskan sebagai berikut: *Terwujudnya pertanian tangguh sebagai penyedia produk pertanian yang aman, berkualitas, berdayasaing dan berkelanjutan.*

Pencapaian visi di atas akan dapat dilihat dari perkuatan peran pertanian dalam mendukung perekonomian DIY, karena pertanian mampu:

- 1) memberikan lapangan kerja dan berusaha terutama bagi penduduk perdesaan;
- 2) meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah untuk mengurangi kemiskinan;
- 3) meningkatkan ketahanan pangan;
- 4) menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi.

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global, Dinas Pertanian Daerah

Istimewa Yogyakarta perlu melakukan perubahan ke arah perbaikan dengan menetapkan visi, yaitu :

“Mewujudkan pertanian tangguh, berdaya saing, berbasis potensi lokal dan berkelanjutan, sebagai penggerak perekonomian regional”.

Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Pertanian.** Pertanian yang dimaksud adalah sistem pengusahaan lahan dan ternak yang pada pokoknya terdiri atas aktivitas budidaya, dengan memanfaatkan semua potensi sumberdaya serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Di samping itu, aspek pengolahan dan pemasaran produk tanaman pangan, hortikultura, dan ternak merupakan aspek-aspek yang perlu diberi penekanan secara simultan. Dengan demikian, sistem pertanian yang akan dikembangkan bersifat komprehensif, berwawasan agribisnis, yang meliputi subsistem hulu (*upstream*), yakni industri input atau sarana; subsistem usahatani (*on-farm*), yakni kegiatan yang menggunakan input, sarana dan sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer; subsistem pengolahan/hilir (*downstream*), yakni industri yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk antara atau produk akhir; subsistem pemasaran (*marketing*), yakni kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik segar maupun olahan, dalam dan luar negeri; subsistem jasa, yakni penyediaan data bagi subsistem hulu ke hilir, seperti penelitian dan pengembangan, perkreditan, asuransi, transportasi, penyuluhan, sistem informasi, dan dukungan kebijakan pemerintah.
2. **Tangguh.** Tangguh berarti mampu menghadapi berbagai goncangan, yang dimungkinkan oleh kemandirian petani karena tidak harus tergantung pada faktor-faktor luar. Pertanian tangguh berarti pertanian yang efisien, berbasis pengetahuan dan teknologi, dengan meminimalkan ketergantungan pada input eksternal dan peran pihak luar, melalui penggunaan sarana produksi pertanian secara bijaksana yang bisa menjamin kelestarian lingkungan, baik

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Pertanian tangguh dicirikan oleh kemampuannya dalam penyediaan produk pertanian berkualitas dalam jumlah cukup, mutu terjamin dan berkelanjutan, dan pada saat yang bersamaan terjadi peningkatan kesejahteraan petani.

3. **Berdayasaing** dicirikan antara lain oleh pilihan komoditas dan bentuk ketersediaan berdasarkan orientasi pasar, upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu merebut pangsa pasar dan mengandalkan produktivitas dan nilai tambah melalui pemanfaatan modal, inovasi teknologi serta kreativitas sumberdaya manusia dan bukan lagi mengandalkan kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja tidak terdidik
4. **Berbasis potensi lokal** adalah bahwa pembangunan pertanian di DIY harus berdasar pada seperangkat kekuatan nilai positif dan kearifan yang dapat digali dari khazanah kultural adiluhung, seperti semangat gotong-royong, hubungan saling memberi dengan alam, dan penyelarasan praktek pertanian dengan perilaku alam.
5. **Berkelanjutan** adalah terus bergerak tanpa berhenti.
6. **Penggerak perekonomian regional** adalah memiliki arti yang penting untuk menggerakkan perekonomian Jawa bagian Tengah.

Pertanian dengan atribusi atau kualitas semacam itu akan terjamin keberlanjutannya karena bertumpu pada perangkat nilai (*value set*) yang luhur.

2. MISI DINAS

Misi pembangunan daerah Pemerintah DIY dalam RPJMD 2012-2017 yang berkaitan dengan pembangunan pertanian yaitu pada misi 2 yaitu "Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif."

Pernyataan misi mengandung hal-hal yang harus diemban oleh Dinas Pertanian untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Mengingat pernyataan visi di muka mendasarkan diri pada peran yang bisa dilakukan oleh Dinas Pertanian DIY dalam rangka mewujudkan pertanian tangguh, maka misi Dinas perlu mencakup dua sudut pandang, yakni sudut pandang ke dalam (*inward looking*) dan sudut pandang keluar (*outward looking*). Pernyataan misi dimaksudkan agar seluruh aparat Dinas mengetahui peran yang akan dilakukan Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencapai tujuan. Selengkapny, misi Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

“Mendorong peningkatan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk pertanian melalui peningkatan SDM, ketersediaan dan optimasi sarana prasarana pertanian, teknologi yang spesifik, inovatif, kreatif dan ramah lingkungan”

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

1. TUJUAN

Dengan mengacu pada visi, misi dan analisis isu strategis Dinas Pertanian yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2012-2017 adalah terwujudnya peningkatan produksi, kualitas dan nilai tambah produk pertanian.

2. SASARAN

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi serta visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan, maka pembangunan pertanian diarahkan pada pencapaian sasaran strategis pembangunan pertanian sebagai berikut:

Sasaran I : Meningkatkan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), dengan indikator kinerja yaitu :

1. Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura

Sasaran II : Meningkatkan populasi ternak, dengan indikator kinerja yaitu :

1. Jumlah populasi ternak

Sasaran III : Meningkatkan nilai tambah produk pertanian. dengan indikator kinerja yaitu :

1. Peningkatan NTP sektor pertanian sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan di atas akan dapat dicapai dengan penentuan-penentuan seperangkat kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan dan disusun dalam program-program yang implementatif dan secara operasional diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur. Secara keseluruhan, kerangka strategi sebagai berikut:

A. STRATEGI/KEBIJAKAN

1. Pengembangan teknologi produksi melalui penerapan *Good Agriculture Practces (GAP)/Standart Operating Procedure (SOP)*;
2. Pengamanan produksi melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dan penanganan dampak bencana alam dan perubahan iklim;
3. Fasilitasi dan optimasi Sarana prasarana Tanaman pangan dan hortikultura (pupuk, benih, bahan pengendalian OPT, alsintan, sumberdaya air, dan permodalan);
4. Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui penerapan *Good Handling Practices (GHP)* dan *Good Manufacturing Practices (GMP)*;

5. Promosi pemasaran produk pertanian di pasar domestik maupun internasional;
6. Perlindungan petani melalui regulasi subsidi harga produk;
7. Fasilitasi prasarana dan sarana penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);
8. Pemberdayaan petani dalam melakukan agribisnis produk unggul pertanian melalui penguatan kelembagaan dan usahanya;
9. Peningkatan kemampuan petani melalui pelatihan, kursus, magang, sekolah lapang;
10. Pengembangan minat generasi muda bekerja di sektor pertanian melalui penumbuhan wirausahawan muda pertanian, pemberian modal usaha bagi generasi muda yang bergerak di sektor pertanian, pendidikan dan latihan khusus pertanian/agribisnis pertanian bagi generasi muda;
11. Peningkatan aplikasi teknologi pertanian oleh masyarakat;
12. Pelaksanaan pembinaan petani dalam menjalankan usaha taninya oleh petugas;
13. Pengembangan kemitraan antar poktan/gapoktan/lembaga petani dengan pihak ketiga dalam membangun rantai pasokan (*suply chain management*);
14. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan;
15. Penguatan kelembagaan kelompok;
16. Peningkatan nilai tambah petani miskin melalui pemberian bantuan sarana prasarana pertanian dan penguatan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan petani miskin.

Tabel 2.
Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis

No	Visi (RPJMD)	Misi (RPJMD)	Visi (RENSTRA)	Misi (RENSTRA)	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongson g Peradaban Baru	Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif	Mewujudkan pertanian tangguh, berdaya saing, berbasis potensi lokal dan berkelanjutan, sebagai penggerak perekonomian regional	Mendorong peningkatan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk pertanian melalui peningkatan SDM, ketersediaan dan optimasi sarana prasarana pertanian, teknologi yang spesifik, inovatif, kreatif dan ramah lingkungan	Terwujudnya peningkatan produksi, kualitas dan nilai tambah produk pertanian	Meningkatkan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura)	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura
						Meningkatkan populasi ternak	Jumlah populasi ternak
						Meningkatkan nilai tambah produk pertanian	Peningkatan NTP sektor pertanian sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. PROGRAM

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pertanian, Dinas Pertanian melaksanakan program yang disesuaikan dengan misi pembangunan pertanian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
2. Program Peningkatan Produksi Hortikultura
3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
5. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani

B. KEGIATAN TAHUN 2012-2017 (REVIEW TAHUN 2016-2017)

Skenario kegiatan sebagai penjabaran operasional dari strategi dan program Dinas Pertanian beserta target serta rencana anggaran tahunan 2012-2017 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.
Program, Indikator Kinerja, Target Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja (outcomes)	REVIEW	Target Kinerja Tahun Ke-				
				2013	2014	2015	2016	2017
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	Baru/Pasca Review	n/a	n/a	n/a	2.203.677	2.208.665
		Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	Lama/Sebelum Review	2.287.400	2.321.800	2.356.600	n/a	n/a
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Jumlah produksi hortikultura (ton)	Tidak ada perubahan	379.400	383.200	387.000	390.900	394.800
3	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak (ekor/animal unit)	Baru/Pasca Review	n/a	n/a	n/a	620.320	641.416
		Jumlah populasi ternak (ekor/animal unit)	Lama/Sebelum Review	644.257	671.634	700.516	n/a	n/a
4	Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	<i>Angka NTP per bulan per sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sumber data dari BPS kemudian diakhir tahun dirata-rata.</i>	Baru/Pasca Review	n/a	n/a	n/a	98.55	99.00
		Persentase peningkatan NTP sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan (%)	Lama/Sebelum Review	1,7	1,7	1,7	n/a	n/a
5	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu (komoditas)	Tidak ada perubahan	3	3	3	3	3

Tabel 4.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Pr ogram Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun- 0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penangun g Jawab	
				Sebelum Review						Pasca REVIEW							
				Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	
2																	
2	1																
																	Dinas Pertanian
																	Dinas Pertanian
																	Dinas Pertanian
																	Dinas Pertanian

SKPD Dinas Pertanian DIY

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun-0 (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Sebelum Review						Pasca REVIEW							Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				Tahun-1 (2013)		Tahun-2 (2014)		Tahun-3 (2015)		Tahun-4 (2016)		Tahun-5 (2017)		target	Rp0			
				target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
1	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani,	Angka NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	Persentase Peningkatan NTP sektor pertanian: 1,7%	Persentase Peningkatan NTP sektor pertanian: 1,7%	3.186.063	Persentase Peningkatan NTP sektor pertanian: 1,7%	2.405.071	Persentase Peningkatan NTP sektor pertanian: 1,7%	2.839.098	Angka NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan 100,25	3.299.786	Angka NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan 100,50	3.791.150	Angka NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan 100,50	3.791.150	Dinas Pertanian		
2	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3 komoditas	3	2.383.491	3	1.565.205	3	1.995.042	3	2.445.724	3	2.922.345	15	2.922.345	Dinas Pertanian		
3	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan: 2.135.582 ton	Produksi tanaman pangan: 2.287.400 ton	5.864.723	Produksi tanaman pangan: 2.321.800 ton	8.922.604	Produksi tanaman pangan: 2.356.600 ton	9.366.111	Produksi tanaman pangan: 2.203.677 ton	10.228.998	Produksi tanaman pangan: 2.208.665 ton	6.437.057	Produksi tanaman pangan: 2.208.665 ton	6.437.057	Dinas Pertanian		
4	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura	Produksi hortikultura: 375.714 ton	Produksi hortikultura: 379.400 ton	2.142.625	Produksi hortikultura: ton	2.137.841	Produksi hortikultura: ton	2.608.901	Produksi hortikultura: 390.900 ton	3.105.681	Produksi hortikultura: 394.800 ton	3.633.186	Produksi hortikultura: 394.800 ton	3.633.186	Dinas Pertanian		
5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan,	Jumlah populasi peternakan	Populasi peternakan: 619.268 AU	Populasi peternakan: 644.257 AU	17.256.785	Populasi peternakan: 671.634 AU	8.093.255	Populasi peternakan: 700.516 AU	8.977.689	Populasi peternakan: 620.320 AU	9.938.180	Populasi peternakan: 641.416 AU	10.978.539	Populasi peternakan: 641.416 AU	10.978.539	Dinas Pertanian		

Tabel 5.
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013-2017
Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja				
			Sebelum Review			Pasca REVIEW	
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Pilihan						
2.01	Pertanian						
2.01.01	Dinas Pertanian						
2.01.2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
2.01.2.01.01.01.001	Penyediaan Surat Menyurat	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran (RPJMD)	230 buah	230 buah	230 buah	230 buah	230 buah
2.01.2.01.01.01.002	Penyediaan Jasa KOMunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran (RPJMD)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
2.01.2.01.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran (RPJMD)	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
2.01.2.01.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran (RPJMD)	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
2.01.2.01.01.01.008	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran (RPJMD)	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
2.01.2.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran (RPJMD)	45 jenis	45 jenis	45 jenis	45 jenis	45 jenis
2.01.2.01.01.01.011	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran (RPJMD)	3 macam	3 macam	3 macam	3 macam	3 macam
2.01.2.01.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran (RPJMD)	17 macam	17 macam	17 macam	17 macam	17 macam

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja				
			Sebelum Review			Pasca REVIEW	
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.01.2.01.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran (RPJMD)	11 macam	11 macam	11 macam	11 macam	11 macam
2.01.2.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran (RPJMD)	6 macam	6 macam	6 macam	6 macam	6 macam
2.01.2.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran (RPJMD)	4.550 os	4.550 os	4.550 os	4.550 os	4.550 os
2.01.2.01.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran (RPJMD)	125 op	125 op	125 op	125 op	125 op
2.01.2.01.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran (RPJMD)	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
2.01.2.01.01.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran (RPJMD)	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
2.01.2.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
2.01.2.01.01.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RPJMD)	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
2.01.2.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RPJMD)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
2.01.2.01.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RPJMD)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
2.01.2.01.01.02.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas operasional	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RPJMD)	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja				
			Sebelum Review			Pasca REVIEW	
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.01.2.01.01.02.026	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RPJMD)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
2.01.2.01.01.02.028	Pemeliharaan Rutin berkala peralatan gedung kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RPJMD)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
2.01.2.01.01.02.042	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RPJMD)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
2.01.2.01.01.02.075	Pembangunan Laboratorium Pestisida (DAK)	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RPJMD)	1 Paket	0	0	0	0
2.01.2.01.01.02.076	Pembangunan/Rehabilitasi UPTD Balai Perbibitan Ternak (DAK)	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RPJMD)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
2.01.2.01.01.02.077	Pembangunan/Rehabilitasi UPTD Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DAK)	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RPJMD)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
2.01.2.01.01.02.078	Pembangunan Gedung BPTP (DAK)	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RPJMD)	0	1 Paket	0	0	0
2.01.2.01.01.02.079	Pengelolaan Naskah Dinas	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RPJMD)	0	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
2.01.2.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
2.01.2.01.01.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	persentase PNS yang mengikuti diklat (RPJMD)	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja				
			Sebelum Review			Pasca REVIEW	
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.01.2.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
2.01.2.01.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan (RPJMD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2.01.2.01.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan (RPJMD)	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis
2.01.2.01.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan (RPJMD)	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis
2.01.2.01.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan (RPJMD)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2.01.2.01.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan						
2.01.2.01.01.17.007	Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan unggulan daerah	Persentase peningkatan Produksi perkebunan (RPJMD)	5 event	5 event	5 event	5 event	5 event
2.01.2.01.01.17.021	Penyebarnya Informasi Perbenihan	Persentase peningkatan Produksi perkebunan (RPJMD)	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket
2.01.2.01.01.17.022	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Persentase peningkatan Produksi perkebunan (RPJMD)	120 Orang	120 Orang	0	120 Orang	120 Orang
2.01.2.01.01.17.023	Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	Persentase peningkatan Produksi perkebunan (RPJMD)	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit
2.01.2.01.01.17.024	Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Peternakan	Persentase peningkatan Produksi perkebunan (RPJMD)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
2.01.2.01.01.17.025	Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan	Persentase peningkatan Produksi perkebunan (RPJMD)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
2.01.2.01.01.17.026	Peningkatan Mutu dan keamanan pangan	Persentase peningkatan Produksi perkebunan (RPJMD)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
2.01.2.01.01.17.027	Profil Pengolahan Hasil Pertanian	Persentase peningkatan Produksi perkebunan (RPJMD)	0	1 unit	0	0	0
2.01.2.01.01.17.028	Peningkatan Mutu Hasil Pertanian Standard Nasional Indonesia (TP, Hortikultura, Peternakan)	Persentase peningkatan Produksi perkebunan (RPJMD)	90 PU	0	90 PU	90 PU	90 PU

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja				
			Sebelum Review			Pasca REVIEW	
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.01.2.01.01.17.029	Penerapan Sistem Jaminan Mutu Pangan Olahan Hasil Pertanian	Persentase peningkatan Produksi perkebunan (RPJMD)	30 PU	0	30 PU	30 PU	30 PU
2.01.2.01.01.17.030	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Persentase peningkatan Produksi perkebunan (RPJMD)	1 tahun	0	1 tahun	1 tahun	1 tahun
2.01.2.01.01.17.031	Pengembangan Pasar Tani	Persentase peningkatan Produksi perkebunan (RPJMD)	0	0	0	1 tahun	1 tahun
2.01.2.01.01.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan						
2.01.2.01.01.22.012	Pengembangan Ternak Kambing/Domba	Peningkatan populasi peternakan (RPJMD)	10 kelompok	12 kelompok	14 kelompok	16 kelompok	18 kelompok
2.01.2.01.01.22.013	Pengembangan Ternak Sapi Perah	Peningkatan populasi peternakan (RPJMD)	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok
2.01.2.01.01.22.014	Pengembangan Ternak Sapi Potong	Peningkatan populasi peternakan (RPJMD)	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok
2.01.2.01.01.22.019	Pengembangan Semen Beku	Peningkatan populasi peternakan (RPJMD)	4.000 dosis	4.000 dosis	4.000 dosis	4.000 dosis	4.000 dosis
2.01.2.01.01.22.023	Pengembangan Pembibitan Ternak	Peningkatan populasi peternakan (RPJMD)	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
2.01.2.01.01.22.025	Pengembangan HPT di Lahan Marginal	Peningkatan populasi peternakan (RPJMD)	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok
2.01.2.01.01.22.026	Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis	Peningkatan populasi peternakan (RPJMD)	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
2.01.2.01.01.22.027	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Strategis (Pengujian Laboratoris)	Peningkatan populasi peternakan (RPJMD)	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
2.01.2.01.01.22.028	Kaji Terap Teknologi Peternakan	Peningkatan populasi peternakan (RPJMD)	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
2.01.2.01.01.22.029	Pengawasan Lalu Lintas Ternak	Peningkatan populasi peternakan (RPJMD)	0	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja				
			Sebelum Review			Pasca REVIEW	
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.01.2.01.01.22.030	Pengembangan Bibit HMT di UPTD BPBPTDK	Peningkatan populasi peternakan (RPJMD)	0	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
2.01.2.01.01.22.032	Peningkatan Pendapatan Peternak Melalui Agribisnis Peternakan	Peningkatan populasi peternakan (RPJMD)	600 KK	100 KK	100 KK	0	0
2.01.2.01.01.22.033	Pengembangan Ternak Unggas	Peningkatan populasi peternakan (RPJMD)	10 kelompok	0	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok
2.01.2.01.01.22.034	Sertifikasi Kambing PE	Peningkatan populasi peternakan (RPJMD)	20 orang	30 orang	40 orang	50 orang	60 orang
2.01.2.01.01.25	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani						
2.01.2.01.01.25.007	Diklat Agribisnis Peternakan	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	0	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
2.01.2.01.01.25.015	Pengkajian Diklat	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang
2.01.2.01.01.25.016	Temu Teknis Teknologi Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
2.01.2.01.01.25.018	Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
2.01.2.01.01.25.020	Diklat Organik Farming	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang
2.01.2.01.01.25.021	Diklat Pemandu SLPHT dan SL Iklim	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang
2.01.2.01.01.25.024	EPL dan Binjut	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja				
			Sebelum Review			Pasca REVIEW	
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.01.2.01.01.25.028	Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara dan Staf Teknis	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	0	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang
2.01.2.01.01.25.029	Diklat Penangkaran Benih Padi, Bawang Merah, dan Buah-buahan bagi Petani/Penangkar	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	0	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
2.01.2.01.01.25.030	Pelatihan Petugas POPT	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	0	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang
2.01.2.01.01.25.031	Fasilitasi Praktek Lapangan dan Pengolahan Laboratorium	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
2.01.2.01.01.25.033	Diklat Integrated Farming	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
2.01.2.01.01.25.034	Diklat Pemanfaatan Limbah Peternakan sebagai Energi Alternatif	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
2.01.2.01.01.25.035	Diklat Kewirausahaan bagi Generasi Muda	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	30 Orang	30 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
2.01.2.01.01.25.036	Apresiasi perencanaan diklat	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
2.01.2.01.01.25.037	Diklat Budidaya dan Pengelolaan HMT	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja				
			Sebelum Review			Pasca REVIEW	
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.01.2.01.01.25.038	Diklat Inseminasi Buatan Kambing	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
2.01.2.01.01.25.039	Diklat Mitigasi dan Perubahan Iklim	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	0	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
2.01.2.01.01.25.040	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	10 Gapoktan	10 Gapoktan	20 Gapoktan	20 Gapoktan	20 Gapoktan
2.01.2.01.01.25.041	Penguatan kelembagaan tingkat usaha	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang
2.01.2.01.01.25.042	Pelatihan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	0	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
2.01.2.01.01.25.043	Diklat Zoonosis	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) (RPJMD)	0	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang
2.01.2.01.01.29	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan						
2.01.2.01.01.29.001	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendampingan WISMP)	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
2.01.2.01.01.29.002	Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan Sawah	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	0	100 Ha	100 Ha	0	0
2.01.2.01.01.29.003	Pemberdayaan P3A dan Peningkatan Jalan Tersier	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja				
			Sebelum Review			Pasca REVIEW	
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.01.2.01.01.29.004	Penanganan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	400 bidang tanah	500 bidang tanah	500 bidang tanah	500 bidang tanah	500 bidang tanah
2.01.2.01.01.29.005	Penyusunan Rencana Kebutuhan	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi
2.01.2.01.01.29.006	Pemupukan Berimbang	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	400 Ha	400 Ha	400 Ha	0	0
2.01.2.01.01.29.007	Pengembangan Padi Terpadu	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	20 Ha	20 Ha	20 Ha	20 Ha	20 Ha
2.01.2.01.01.29.008	Pengembangan Alsin Tanaman Pangan	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit
2.01.2.01.01.29.010	Identifikasi Padi Hitam	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
2.01.2.01.01.29.011	Pelayanan Sertifikasi Padi dan Palawija	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	100 Sampel	100 Sampel	100 Sampel	100 Sampel	100 Sampel
2.01.2.01.01.29.013	Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Pengolahan Hasil Pertanian (Tan. Pangan, Hortikultura, Peternakan)	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	100 unit	100 unit	100 unit	0	0
2.01.2.01.01.29.015	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	46,5 Ha	46,5 Ha	46,5 Ha	46,5 Ha	46,5 Ha
2.01.2.01.01.29.016	Perbanyak Benih Sumber di Tingkat Petani	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha
2.01.2.01.01.29.017	Penyediaan Benih dan Pengembangan jabal Kedelai	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok
2.01.2.01.01.29.018	Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Ubi Kayu	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha
2.01.2.01.01.29.019	Fasilitasi Sarana Teknologi Budidaya Jagung Hibrida	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	8 unit	8 unit	0	0	0

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja				
			Sebelum Review			Pasca REVIEW	
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.01.2.01.01.29.020	Pengembangan dan Pembinaan Budidaya Garut	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	0	4 unit	0	4 unit	4 unit
2.01.2.01.01.29.021	Pengembangan Tanaman Ubi Jalar	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	0	3 unit	3 unit	0	0
2.01.2.01.01.29.022	Pengembangan Tanaman Kacang Hijau	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	15 Ha	15 Ha	15 Ha	15 Ha	15 Ha
2.01.2.01.01.29.023	Uji Ketahanan varietas	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
2.01.2.01.01.29.024	Bimbingan dan Fasilitasi Sarana Pengendalian OPT dan Brigade Proteksi	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
2.01.2.01.01.29.025	Pemberdayaan Petani Pemandu SLPHT	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok
2.01.2.01.01.29.026	SLPHT Berkelanjutan	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
2.01.2.01.01.29.027	SLPHT Tanaman Pangan	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	2 unit	2 unit	0	0	0
2.01.2.01.01.29.029	Analisa standar dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
2.01.2.01.01.29.031	Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Agribisnis Tanaman Pangan	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	5 kab/kota	5 kab/kota	5 kab/kota	0	0
2.01.2.01.01.29.032	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (HIBAH LOAN WISMP)	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket
2.01.2.01.01.29.033	Observasi dan Identifikasi Penyebaran Varietas Tanaman Pangan	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
2.01.2.01.01.29.034	Pengembangan Tanaman Pangan Terpadu	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (RPJMD)	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
2.01.2.01.01.30.035	Pengamatan dan Analisa Kehilangan Hasil Karena OPT Tanaman Pangan	Peningkatan produksi pertanian hortikultura (RPJMD)	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja				
			Sebelum Review			Pasca REVIEW	
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.01.2.01.01.30	Program Peningkatan Produksi Hortikultura						
2.01.2.01.01.30.001	Pengembangan GAP Hortikultura	Peningkatan produksi pertanian hortikultura (RPJMD)	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten	4 kabupaten
2.01.2.01.01.30.002	Pengembangan Hortikultura Terpadu	Peningkatan produksi pertanian hortikultura (RPJMD)	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten	3 kabupaten
2.01.2.01.01.30.003	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengembangan Buah, Sayur, dan Tanaman	Peningkatan produksi pertanian hortikultura (RPJMD)	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok
2.01.2.01.01.30.004	Peningkatan Budidaya Holtikultura di Lahan Pekarangan	Peningkatan produksi pertanian hortikultura (RPJMD)	6 kelompok	6 kelompok	6 kelompok	6 kelompok	6 kelompok
2.01.2.01.01.30.005	Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Agribisnis Hortikultura	Peningkatan produksi pertanian hortikultura (RPJMD)	600 KK	250 KK	250 KK	0	0
2.01.2.01.01.30.006	Fasilitasi Pengelolaan Lahan dan Air untuk Pengembangan Buah Sayur dan Tan Obat	Peningkatan produksi pertanian hortikultura (RPJMD)	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok
2.01.2.01.01.30.007	Pengembangan Perbenihan Hortikultura	Peningkatan produksi pertanian hortikultura (RPJMD)	10 komoditas	10 komoditas	10 komoditas	10 komoditas	10 komoditas
2.01.2.01.01.30.008	Pengembangan Benih Sayuran di Tingkat Petani	Peningkatan produksi pertanian hortikultura (RPJMD)	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok
2.01.2.01.01.30.009	Sosialisasi Pengelolaan Lahan Pekarangan	Peningkatan produksi pertanian hortikultura (RPJMD)	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota	1 kab/kota
2.01.2.01.01.30.010	Pengembangan Buah, Sayur dan Biofarmaka	Peningkatan produksi pertanian hortikultura (RPJMD)	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
2.01.2.01.01.30.012	SLPHT Tanaman Hortikultura	Peningkatan produksi pertanian hortikultura (RPJMD)	3 unit	3 unit	0	0	0
2.01.2.01.01.30.013	Fasilitasi Sarana Pengendalian OPT dan Brigade Proteksi Tanaman Hortikultura	Peningkatan produksi pertanian hortikultura (RPJMD)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
2.01.2.01.01.30.014	Pengembangan Tanaman Hias	Peningkatan produksi pertanian hortikultura (RPJMD)	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok
2.01.2.01.01.30.015	Analisa Standard fan Pengawasan Mutu Benih Hortikultura	Peningkatan produksi pertanian hortikultura (RPJMD)	0	0	0	1 tahun	1 tahun

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja				
			Sebelum Review			Pasca REVIEW	
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.01.2.01.01.30.016	Observasi dan Identifikasi Penyebaran Varietas Hortikultura	Peningkatan produksi pertanian hortikultura (RPJMD)	0	0	0	2 unit	2 unit
2.01.2.01.01.30.022	Penerapan GPP Komoditas Unggulan Hortikultura	Peningkatan produksi pertanian hortikultura (RPJMD)	1 kelompok	1 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	3 kelompok
2.01.2.01.01.30.023	Pengamatan dan Analisa Kehilangan Hasil Karena OPT Hortikultura	Peningkatan produksi pertanian hortikultura (RPJMD)	0	0	0	2 dokumen	2 dokumen

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENJADI SASARAN RPJMD

Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi sasaran dalam RPJMD 2012-2017 tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 6.
SEMULA
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja (Outcomes) dan Target Kinerja
Dinas Pertanian DIY

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (outcomes)	Target Kinerja Tahun Ke-				
				2013	2014	2015	2016	2017
1	Terwujudnya peningkatan produksi, kualitas dan nilai tambah produk pertanian	Meningkatkan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura)	Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	2.287.400	2.321.800	2.356.600	2.391.900	2.427.800
			Jumlah produksi hortikultura (ton)	379.400	383.200	387.000	390.900	394.800
		Meningkatkan populasi ternak	Jumlah populasi ternak (ekor/animal unit)	644.257	671.634	700.516	730.989	763.152
		Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan petani	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan (%)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
		Meningkatkan nilai tambah produk pertanian	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu (komoditas)	3	3	3	3	3

sumber : dokumen RPJMD 2012-2017

Tabel 7.
PASCA REVIEW
 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja (Outcomes) dan Target Kinerja
 Dinas Pertanian DIY

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (outcomes)	Target Kinerja Tahun Ke-	
				2016	2017
1	Terwujudnya peningkatan produksi, kualitas dan nilai tambah produk pertanian	Meningkatkan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura)	Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	2.203.677	2.208.665
			Jumlah produksi hortikultura (ton)	390.900	394.800
		Meningkatkan populasi ternak	Jumlah populasi ternak (ekor/animal unit)	620.320	641.416
		Meningkatkan nilai tambah produk pertanian	<i>Angka NTP per bulan per sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sumber data dari BPS kemudian diakhir tahun dirata-rata.</i>	98.55	99.00
Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu (komoditas)	3		3		

sumber : dokumen Review RPJMD 2012-2017

Review target kinerja tahun 2016-2017 penting dilaksanakan dikarenakan melihat hasil evaluasi realisasi tahun 2013-2014 terjadi penurunan jumlah produksi tanaman pangan, jumlah populasi ternak dan nilai NTP disebabkan oleh adanya perubahan cara penghitungan yang dilakukan oleh BPS.

Berdasar metodologi penghitungan BPS untuk komoditas tanaman pangan, apabila pertanaman tanaman pangan melebihi 3 kali jarak tanam normal, maka tidak dihitung sebagai pertanaman yang menghasilkan produksi. Dengan adanya kejadian tersebut mengakibatkan luas tanam dan luas panen menurun dan berdampak pada penurunan produksi.

Berdasar metodologi penghitungan BPS untuk komoditas ternak harus menyesuaikan dengan data dasar tahun 2013, hal ini dikarenakan adanya sensus

pertanian tahun 2013 (ST 2013) yang dilakukan secara nasional oleh BPS RI dimana hasil ST 2013 menunjukkan turunnya populasi ternak (khususnya sapi) secara nasional dengan rerata 20%. Hasil ST 2013 harus digunakan sebagai data dasar perhitungan populasi ternak tahun berikutnya (sebagai Po).

Berdasar metodologi penghitungan BPS , tahun 2009-2013 penghitungan NTP menggunakan angka dasar tahun 2007. Kemudian mulai bulan Desember 2013 penghitungan NTP menggunakan angka dasar tahun 2012 sebagaimana tercatat di Berita Resmi Statistik DIY periode bulan Februari 2014. Perubahan angka dasar disebabkan perbedaan angka konsumsi tahun 2012 dengan tahun 2007. Hal ini berakibat pada menurunnya NTP pada tahun 2014 pada semua sub sektor.

Dalam pengukuran realisasi kinerja per tahun menggunakan sumber data Berita Resmi Statistik BPS. Angka produksi tanaman pangan dihitung berdasarkan data statistik tanaman pangan yang dihitung setiap 4 bulan (SUBROUND) oleh BPS dan Dinas Pertanian DIY yang kemudian ditetapkan sebagai Angka Tetap (ATAP) pada tahun berikutnya. Angka populasi ternak dihitung berdasarkan data statistik ternak yang dihitung setiap bulan per tanggal 25 tiap bulannya oleh mantri ternak di tiap kecamatan yang dikoordinir Dinas Peternakan Kabupaten. Peningkatan populasi ternak tidak dapat dihitung setiap bulan atau triwulan karena angka tersebut diperoleh dari perbandingan populasi ternak tahun n dibandingkan populasi ternak tahun $n-1$. Selain itu angka populasi tiap ternak berbeda karena (1) masa reproduksi populasi ternak besar (sapi, kerbau, kuda, dll) rata-rata membutuhkan waktu sekitar 9 bulan (2) masa reproduksi populasi ternak kecil (kambing, domba, babi, dll) rata-rata membutuhkan waktu sekitar 3-5 bulan (3) penambahan dan pengurangan populasi ayam potong berputar sekitar 3 bulan (4) masa reproduksi populasi ayam buras berkisar 21 hari. Angka NTP per bulan per sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sumber data dari BPS yang dirilis dalam Berita Resmi Statistik.

BAB VII

PENUTUP

Review Renstra Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun mendatang (terutama capaian 2016-2017) dan mengacu Review RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas itu, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra Tahun 2012-2017 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Pertanian DIY dengan Pelaksana Harian pada Kepala Bidang dan jajarannya;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan dibantu oleh Sekretaris Dinas;
3. Seluruh Bidang/UPTD yang ada di lingkungan Dinas Pertanian DIY agar melaksanakan program-program dalam Renstra Tahun 2012-2017 dengan sebaik-baiknya;
4. Penjabaran lebih lanjut Renstra Tahun 2012-2017 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan Renja Dinas Pertanian DIY;
5. Renstra Dinas Pertanian DIY harus menjadi acuan bagi setiap Bidang/UPTD dalam menyusun Rencana Kerja yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai;
6. Agar Renstra Tahun 2012-2017 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap SKPD perlu mengupayakan penguatan peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2017, di samping itu ditempuh melalui proses sosialisasi, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Dinas Pertanian DIY, instansi terkait maupun masyarakat luas;

7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Review Renstra Tahun 2012-2017, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian Tahun 2016-2017, sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana program dan kegiatan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Bidang/ UPTD;
 - b. Sekretaris Dinas Pertanian DIY menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana program dan kegiatan dari masing-masing Pimpinan Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala Bidang/UPTD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya;
 - d. Sekretaris Dinas Pertanian DIY menyusun evaluasi program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Bidang/UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya.

Apabila dalam periode pelaksanaan Review Renstra Tahun 2012-2017 dihadapkan pada hal-hal di luar kendali Dinas Pertanian DIY, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada Pemerintah DIY untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

